

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Surat Pernyataan Keaslian.....	iv
Halaman Persetujuan Publikasi.....	v
Motto dan Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
Abstrak	xii
Abstract	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Terminologi	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	19
B. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	25
C. Pengertian Tindak Pidana	34
D. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	41
E. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Islam.....	53
BAB III PEMBAHASAN	59
A. Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	59

B.	Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor :	
	54/Pid.Sus/2016/PN Kdl.....	96
	1. Kronologi Kasus	96
	2. Analisis Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN Kdl terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	103
BAB IV	PENUTUP.....	113
	4.1. Kesimpulan	113
	4.2. Saran	116
	Daftar Pustaka	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bentuk Reparasi Korban Menurut Instrumen HAM Internasional	51
Tabel 2. Kriminalisasi Perdagangan Orang Dalam Pasal Lain	63
Tabel 3. Pasal Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Yang Dapat Digunakan Untuk Menindak Perlaku Perdagangan Orang	69
Tabel 4. Pasal Dalam Undang-Undang Saksi Dan Korban Yang Dapat Digunakan Untuk Melindungi Korban Perdagangan Orang	73
Tabel 5. Pasal Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Yang Dapat Digunakan Untuk Menindak Pelaku Perdagangan Orang	76
Tabel 6. Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Imigrasi Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang	77
Tabel 7. Pasal dalam Undang-Undang Kesehatan yang berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang	80
Tabel 8. Pasal Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berkaitan Dengan Perdagangan Orang	82
Tabel 9. Pasal Dalam Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang	84
Tabel 10. Pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang	86
Tabel 11. Pasal dalam Undang-Undang Pengadilan HAM yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang	90